



Media Title	Kompas		
Head Line	Pertumbuhan Jalan Tol Lambat		
Date	26 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	19	Article Size	
Journalist	ARN	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

INFRASTRUKTUR

Pertumbuhan Jalan Tol Lambat

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan jalan tol yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kini masih terkendala pembebasan lahan. Akibatnya, pertumbuhan panjang jalan tol masih jauh dari kebutuhan.

Padahal, kebutuhan jalan tol semakin meningkat ketika kondisi jalan arteri sudah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pengguna jalan raya yang terus meningkat.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dalam sambutan pembukaan pada diskusi Forum Wartawan Perhubungan, masalah inti pembebasan lahan pada dasarnya bukan pada ketersediaan lahan, melainkan bagaimana mencapai konsensus tentang harga yang pantas dengan pemilik lahan.

"Perbankan akhirnya enggan meminjamkan uang untuk pembebasan lahan karena ketidakpastian besarnya biaya dan waktu yang dibutuhkan," kata Djoko di Jakarta, Selasa (25/3).

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) A Gani Akman, untuk mengatasi masalah itu, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum BPJT dan *land capping* yang menyediakan dana talangan untuk pembebasan lahan, dan mengambil risiko terhadap harga ta-



Hingga kini, jalan tol yang sudah terbangun baru 927 kilometer, sementara jalan tol yang dioperasikan baru sekitar 700 kilometer.

nah.

"Dananya sekitar Rp 3,5 triliun, dan bisa dipinjam badan usaha jalan tol," ujar Gani.

Ia mengatakan, pemerintah telah merencanakan membangun sekitar 2.400 kilometer jalan tol. Namun, hingga kini, jalan tol yang sudah terbangun baru 927 km, sementara jalan tol yang dioperasikan baru sekitar 700 km.

"Dengan meminjamkan dana talangan dan *land capping*, badan usaha bisa segera membebaskan lahan," kata Gani.

Presiden Direktur PT Astratel, anak perusahaan Astra International yang menangani jalan tol, Wiwiek D Santoso mengatakan,

pembangunan konstruksi Jalan Tol Mojokerto-Kertosono di bawah anak perusahaan PT Marga Harjaya Infrastruktur berjalan lambat akibat pembebasan lahan yang sepotong-sepotong dan menyebar.

"Di seksi 2, lahan yang dibebaskan memang sudah 80 persen. Namun, karena terpecah, pembangunan konstruksi baru 36 persen," ujarnya.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, mengatakan, masalah pembebasan lahan harus segera diselesaikan mengingat ke depan akan banyak tantangan lain. "Misalnya saja saat ini DKI Jakarta menaikkan nilai jual obyek pajak sebesar 100 persen. Kenaikan itu memang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, akan membuat biaya pembebasan lahan untuk infrastruktur juga semakin mahal," ujar Yayat.

Di akhir diskusi, Gani Akman mengatakan, mulai tahun 2015 pemerintahan akan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk infrastruktur.

"Dengan UU ini, pemilik lahan harus menyerahkan lahaninya dengan harga yang ditentukan penaksir (*appraisal*) independen. Lamanya proses juga ditentukan agar tidak berkepanjangan," kata Gani. (ARN)